



Membantah Pernyataan 'Indonesia Negara Gagal'

Sudi Silalahi

PERPUSTAKAAN KPK

No. Induk :
00258/RSRUS-
KPK /2013

No. Panggil :
A AP 28

PENGANTAR

Di bulan Agustus tahun 2011 ini, bangsa Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun ke-66 Proklamasi Kemerdekaannya. Bagi bangsa manapun, peringatan hari kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan adalah momentum yang paling tepat untuk melakukan introspeksi, kontemplasi sekaligus melakukan refleksi, atas berbagai capaian, prestasi maupun pengalaman pembangunan, guna dapat di jadikan sebagai pembelajaran dalam menyikapi konstruktif tantangan peradaban yang tidak ringan di masa yang akan datang.

Bagi bangsa Indonesia, selama lebih dari enam dekade membangun bangsa dan negara, sesungguhnya telah cukup banyak prestasi pembangunan yang berhasil kita torehkan, baik bagi kemajuan taraf hidup warga bangsa maupun untuk

dikontribusikan pada pemajuan hajat hidup kemanusiaan. Bahkan, lebih dari satu dekade setelah digulirkannya reformasi gelombang pertama tahun 1998, bangsa Indonesia terbukti sanggup meraih kemajuan pembangunan yang makin pesat dengan hasil-hasil yang makin signifikan.

Pada ranah politik dan pembangunan demokrasi, bangsa Indonesia, di kurun waktu satu dekade terakhir, telah berhasil membangun proses politik yang dinamis dan berkelanjutan yang, antara lain ditunjukkan dengan pelaksanaan pemilu demokratis dan tepat waktu, pemeliharaan stabilitas politik yang makin kondusif, serta pemajuan kehidupan multi partai yang makin semarak ditengah pelaksanaan sistem presidensiil sesuai amanat konstitusi.

Berbagai kemajuan itu adalah indikator-indikator yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah sanggup melewati tahapan penting dalam pembangunan demokrasi, yakni pemenuhan syarat-syarat prosedural. Bangsa Indonesia saat ini menapaki tahapan pembangunan berdemokrasi yang lebih tinggi, yaitu penerapan praktik berdemokrasi yang lebih substansial.

Keberhasilan pembangunan berdemokrasi itu menjadikan Indonesia saat ini diakui sebagai salah satu model konsolidasi demokrasi yang paling berhasil di kawasan Asia dan Afrika. Sejumlah negara sahabat yang sedang mengalami transisi demokrasi kerap mengundang Indonesia untuk mempresentasikan agenda demokrasi Indonesia guna dijadikan sebagai teladan bagi proses transisi demokrasi di negeri mereka masing-masing.

Pada ranah ekonomi, selama lebih dari enam dekade bangsa Indonesia bangkit dari pengelolaan pembangunan yang sebatas berbasiskan *resources driven economy* di tahun '50 an dan '60 an, hingga menjadi *efficient driven economy* yang ditopang oleh teknologi modern. Dari negara dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 0,5% hingga 0,6% di tahun '60 an hingga menjadi negara yang pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di era '90 an. Dari negara yang sempat terpuruk di terpa krisis perekonomian global di akhir tahun '90 an, hingga pulih menjadi negara yang sanggup membangun landasan ekonomi yang jauh lebih kokoh;

dan mampu bertahan ketika diterpa krisis keuangan global yang lebih dahsyat di tahun 2008.

Dengan performa pembangunan ekonomi yang sangat signifikan, utamanya di tahun-tahun terakhir, Indonesia saat ini tidak lagi berada di kelompok negara dunia ketiga berpenghasilan rendah --*third world, low income economy*--. Indonesia saat ini adalah negara dengan kekuatan ekonomi ke-17 terbesar di dunia --*major economic power*-- yang menjadi anggota G-20, serta telah memasuki kelompok negara berpenghasilan menengah --*middle income countries*--.

Di balik berbagai kemajuan pembangunan yang telah nyata dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yang ditunjukkan dengan penurunan pengangguran, penurunan kemiskinan dan diiringi dengan peningkatan jumlah kelas menengah di kalangan masyarakat, kita mencermati pendapat sebagian kecil warga bangsa yang menyatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam perjalanan menuju negara gagal --*failed states*--.

Pada makalah ini akan diuraikan secara ringkas ihwal negara gagal dan bantahan tegas bahwasanya tidak ada alasan untuk menyatakan Indonesia adalah negara gagal. Kemajuan pembangunan bangsa Indonesia adalah sebuah perkembangan peradaban yang sangat jelas, kongkrit dan nyata yang bahkan telah diakui dan diapresiasi oleh komunitas internasional.

PEMAHAMAN ISTILAH NEGARA GAGAL --*FAILED STATE*--

Diskusi ihwal negara gagal atau *failed states*, sejatinya mulai sering dibahas di komunitas politisi dan pakar geo-strategis di awal tahun 2000-an. Adalah pakar dari lembaga pemikir terkenal AS, *RAND Corporation*, James Quinlivan, yang menyinggung tentang negara gagal pada ulasannya "*Burden of Victory: The Painful Arithmetic of Stability Operations*," yang dirilis pada *Rand Review* di musim panas 2003, bersamaan dengan itu, peneliti RAND lainnya, James Dobbins, juga menyinggung negara gagal pada ulasan "*Nation-building: The Inescapable*

Responsibility of the World's only Superpower,” yang juga dirilis pada *Rand Review* di musim panas 2003.

Pakar dan penulis lainnya yang juga pernah menyinggung negara gagal antara lain, Thomas Homer-Dixon, professor lingkungan, Universitas Waterloo, Kanada, dalam bukunya *“The Upside of Down: Catastrophe, Creativity, and the Renewal of Civilization”*, yang diterbitkan oleh *Toronto, Knopf Canada* pada tahun 2006; Derek Fraser, mantan Dubes Kanada di Ukraina, Yunani dan Hongaria, juga pernah mengulas ihwal negara gagal bertajuk *“Failed States: Why They Matter and What We Should Do about Them”*; dan Jared Diamond, professor geografi, *University of California, Los Angeles* juga menyinggung negara gagal dalam bukunya *“Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed”*.

Peneliti lainnya, Stewart Prest dari *University of British Columbia*, Kanada juga mengulas negara gagal pada bukunya, *“Working out strategies for strengthening fragile states – the British, American and German Experience,”* dan Noam Chomsky professor dari MIT --*Massachusetts Institute of Technology*-- pada bukunya, *“Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy”*, yang terbit pada tahun 2006.

Dari semua ulasan ihwal negara gagal yang disebutkan diatas, secara umum para penulisnya mengemukakan beragam definisi, parameter dan faktor-faktor yang beragam tentang negara gagal. Jared Diamond, antara lain, lebih banyak mengulas faktor lingkungan dan keberlanjutan daya dukung ekosistem sebagai faktor utama yang menentukan keberhasilan dan kegagalan tatanan peradaban. Derek Fraser, menyebut negara gagal sebagai negara yang tidak sanggup mengelola penataan wilayah teritorialnya sendiri dan tidak sanggup memenuhi kewajiban internasional. Fraser, antara lain, menyebut Afghanistan, Kongo, Kosovo, Somalia dan Irak sebagai beberapa contoh negara gagal.

Di sisi lain, pemahaman negara gagal juga bersifat dinamis dan bergantung pada rentang waktu. Sebuah negara dapat dikategorikan sebagai negara gagal di masa tertentu namun seiring perbaikan komprehensif pada penataan kehidupan

berbangsa dan bernegaranya, dapat tampil menjadi negara yang stabil dan berkelanjutan di masa depan, demikian pula sebaliknya.

Stewart Prest, pada bukunya, *“Working out strategies for strengthening fragile states – the British, American and German Experience,”* antara lain, menyinggung Jerman di era rezim Nazi di tahun '30 an sebagai contoh negara gagal. Di masa itu pemerintahan fasis otoritarian Jerman telah menjadikan negeri itu sebagai pengobar Perang Dunia Kedua di Eropa yang justru malah berujung pada kekalahan Jerman sendiri. Namun seiring dengan kesanggupan Jerman untuk bangkit dari reruntuhan perang, serta kemampuannya untuk merestorasi pemerintahannya hingga menjadi lebih demokratis, telah menjadikan negeri itu sebagai negara yang stabil, sejak paska Perang Dunia Kedua hingga sekarang.

Sebaliknya Noam Chomsky dalam buku *“Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy”*, menunjuk Amerika Serikat yang saat ini dikategorikan sebagai negara yang stabil dan berkelanjutan, justru berpotensi untuk menjadi negara gagal di kurun waktu beberapa tahun mendatang.

Dalam bukunya yang setebal 320 halaman itu, Chomsky dengan kritis dan lugas menyatakan bahwa apabila pemerintah AS tidak sanggup menyelesaikan prahara di Afghanistan dan Irak dengan baik, maka AS berpeluang menjadi negara gagal di masa depan; dan kegagalannya berpotensi untuk membahayakan kemajuan demokrasi dan pembangunan kemanusiaan pada skala global.

INDIKATOR NEGARA GAGAL -- FAILED STATE--

Perkembangan geo politik global yang sangat dinamis di tahun 2003 hingga 2005 menjadikan diskusi tentang negara gagal makin marak dan makin mengemuka. Sejak tahun 2005 sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berorientasi pada kebijakan publik di AS, yaitu *Fund for Peace* bersama dengan majalah geo-politik kenamaan AS, *“Foreign Policy”* meluncurkan

indeks tentang negara gagal yang lazim disebut dengan *Failed State Index* disingkat FSI.

Merujuk pada indeks FSI indikator negara gagal diukur dari tiga parameter yaitu sosial, politik dan ekonomi.

Pada parameter sosial, faktor-faktor penentunya meliputi (1) Tekanan Demografis, yang didefinisikan sebagai tekanan kepadatan penduduk yang relatif lebih tinggi terhadap pasokan pangan dan sumber daya yang mendukung kehidupan lainnya. Pada faktor ini juga dimasukkan tekanan dari pola pemukiman penduduk, termasuk sengketa perbatasan, kepemilikan atau hunian lahan, akses transportasi, dan kedekatan terhadap bahaya lingkungan;

(2). Pergerakan besar besaran pengungsi, yang didefinisikan sebagai Kekerasan atau penindasan yang menyebabkan kekurangan makanan, kekurangan air bersih, persaingan lahan, dan kekacauan yang dapat menjadi masalah kemanusiaan dan keamanan yang lebih besar, baik di dalam negeri dan antar negara;

(3) Warisan Dendam dan keluhan Kelompok tertentu yang didefinisikan sebagai Ketidakadilan yang terjadi di masa kini atau di masa lalu. Faktor ini juga termasuk kekejaman yang dilakukan dengan impunitas terhadap kelompok-kelompok komunal dan / atau kelompok masyarakat tertentu oleh otoritas negara, atau oleh kelompok-kelompok dominan; keberadaan eksklusifitas politik yang dilembagakan; adanya pengkambinghitaman kelompok yang diyakini telah memperoleh kekayaan, status atau kekuasaan; kehadiran sikap “kebencian” dan stereotip bagi kelompok tertentu;

Dan (4) Pelarian warga negara yang kronis dan berkelanjutan, yang didefinisikan sebagai makin banyaknya warga negara yang melarikan diri ke luar negeri, serta pertumbuhan signifikan dari komunitas-komunitas pengasingan.

Pada parameter politik, faktor-faktornya meliputi, (1) Kriminalisasi dan/atau delegitimasi negara yang didefinisikan

dari tingkat korupsi endemik dan resistensi terhadap transparansi, akuntabilitas dan representasi politik, termasuk makin hilangnya kepercayaan terhadap institusi negara;

(2) Penurunan Pelayanan Publik yang berkelanjutan, yang didefinisikan sebagai makin hilangnya fungsi utama negara dalam melayani warganya, termasuk kegagalan dalam perlindungan terhadap terorisme dan kekerasan, dan penyediaan layanan publik yang layak utamanya kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan transportasi;

(3) Pelanggaran HAM yang luas yang didefinisikan sebagai kehadiran pemerintahan yang otoriter, diktator atau militer di mana lembaga-lembaga konstitusional dan demokratis dimanipulasi; peningkatan jumlah tahanan politik; peningkatan penyalahgunaan hak-hak hukum, politik dan sosial, termasuk individu, kelompok atau lembaga kebudayaan; maraknya pelecehan terhadap pers, politisasi peradilan, penggunaan kekuatan militer untuk tujuan-tujuan politik khususnya untuk merepresi lawan-lawan politik;

(4) Aparatur Keamanan sebagai “Negara dalam Negara” yang didefinisikan sebagai kehadiran unsur *praetorian guard* atau semacam elit-militer yang beroperasi dengan kekebalan hukum yang difasilitasi negara, untuk meneror lawan-lawan politik maupun warga sipil yang menjadi oposan politik pemerintah ataupun yang bersimpati kepada oposisi;

(5) Kemunculan Elit Faksional yang didefinisikan sebagai adanya fragmentasi elit penguasa dan lembaga lembaga negara. Penggunaan retorika nasionalistis agresif oleh para elit penguasa, terutama bentuk-bentuk destruktif seperti “pembersihan etnis”;

(6) Intervensi Negara atau Faktor Eksternal yang didefinisikan sebagai keterlibatan militer luar negeri dalam urusan internal negara yang mempengaruhi keseimbangan kekuasaan domestik. Termasuk dalam faktor ini juga

kehadiran intervensi negara penyumbang dana yang terlalu besar hingga menyebabkan ketergantungan negara tersebut terhadap bantuan asing atau pada misi penjaga perdamaian.

Pada parameter ekonomi faktor-faktor penentunya meliputi: (1) Ketidakmerataan perkembangan ekonomi antar kelompok -*uneven economic development along group lines*-- yang didefinisikan sebagai ketidakmerataan antar kelompok masyarakat terhadap akses pendidikan, pekerjaan dan status ekonomi. Ketidakmerataan perkembangan ekonomi juga mencakup tingginya angka kemiskinan, angka kematian, dan rendahnya akses pendidikan;

(2) Perburukan keadaan ekonomi yang tajam --*sharp and/ or severe economic decline*-- yang didefinisikan sebagai tingkat memburuknya keadaan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan penurunan pendapatan perkapita, peningkatan hutang negara, penurunan tajam dari harga komoditas, rendahnya arus investasi, ketidaksanggupan pembayaran utang, runtuhnya atau melemahnya nilai tukar, serta maraknya aktifitas *hidden economy*, seperti perdagangan obat terlarang, penyelundupan dan pelarian modal keluar negeri. Perburukan keadaan ekonomi juga mencakup kegagalan pemerintah dalam membayar gaji dan pensiun para aparatur negara yang meliputi pegawai negeri untuk mengelola birokrasi negara; serta gaji anggota angkatan bersenjata dan kepolisian untuk mengawal keamanan, ketertiban dan kedaulatan negara.

Dari ketiga indikator diatas berikut faktor-faktornya masing-masing, FSI memberikan empat kategori pada konteks negara gagal, mulai dari peringkat terbaik yaitu kategori stabil-berkelanjutan atau *sustainable* yakni negara yang dinilai stabil dan berhasil dalam penyelenggaraan pemerintahannya; kategori sedang atau *moderate*; kategori peringatan atau *warning*; hingga peringkat terburuk, yaitu kategori *alert* atau negara yang dinilai telah gagal dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi warganya.

Dari tahun 2005 hingga 2011 atau sekitar enam tahun melakukan evaluasi, FSI memberikan penilaian negara gagal kepada beberapa negara di kawasan Afrika, Timur Tengah dan Asia Tengah, khususnya Sudan, Somalia, Irak dan Afghanistan. Penilaian dengan kategori peringatan atau *warning* diberikan kepada negara-negara bekas Uni Soviet dan beberapa negara di Amerika Latin, Asia Timur dan Asia Tenggara.

Amerika Serikat dan sebagian besar negara demokrasi modern, di berikan penilaian dengan kategori sedang atau *moderate*. Hanya sebagian kecil negara-negara Skandinavia --antara lain Finlandia dan Eslandia-- yang diberikan penilaian dengan kategori terbaik yaitu *sustainable* atau stabil-berkelanjutan.

Pada rilis terbaru yaitu penilaian FSI untuk tahun 2011 yang dilansir pada tanggal 20 Juni 2011, FSI menempatkan Indonesia di peringkat ke-64 dari 177 negara yang diukur, dengan skor 81,6 dan dimasukkan dalam kategori peringatan atau *warning*. FSI juga menyatakan bahwa peringkat Indonesia terus membaik secara signifikan sejak tahun 2005 lalu.

Pada lingkup Asia Tenggara, posisi Indonesia itu lebih baik, bila dibandingkan Myanmar (peringkat 18, skor 98,3), Timor Leste (peringkat 23 skor 94,9) Kamboja (peringkat 38, skor 88,5), Laos (peringkat 46, skor 86,7), Papua Nugini (peringkat 54, skor 84,2) dan Filipina (peringkat 50, skor 85). Indonesia agak tertinggal dibandingkan Vietnam (peringkat 88, skor 76,1), Thailand (peringkat 78, skor 78,3), Malaysia (peringkat 111 skor 68,7), Brunei (peringkat 122 skor 65,8) dan Singapura (peringkat 157 skor 35,1). *Catatan: semakin kecil skor semakin baik tingkat stabilitas negara yang diukur.*

Pada lingkup global, 10 peringkat teratas negara yang dinilai gagal di tahun 2011 menurut FSI berikut skornya masing-masing secara berturut-turut adalah Somalia (113,4), Chad (110,3), Sudan (108,7), Kongo (108,2), Haiti (108), Zimbabwe (107,9), Afghanistan (107,5), Republik Afrika Tengah (105), Irak (104,8) dan Republik Pantai Gading (102,8).

Sedangkan tiga negara yang dikategorikan stabil berkelanjutan terbaik di dunia adalah Swedia (peringkat 175, skor 22,8); Norwegia (peringkat 176, skor 20,4) dan Finlandia dengan peringkat tertinggi yaitu 177 dan skor terbaik 19,7.

MEMBANTAH PERNYATAAN 'INDONESIA NEGARA GAGAL'

Berbeda dengan indeks pengembangan manusia --*Human Development Index*-- yang telah diterima secara luas dan telah sering diadopsi sebagai parameter kemajuan pembangunan, indeks FSI, hingga kini belum diakui sepenuhnya oleh komunitas internasional. Indeks itu dinilai terlalu kontroversial dan bahkan menuai sejumlah kritik; Dr Mohammed Mustafa El Baradai, tokoh internasional dan pemenang hadiah Nobel asal Mesir, adalah salah satu sosok yang ikut mengkritisi indeks FSI. Di AS dan di Eropa Barat, indeks FSI lebih banyak digunakan oleh kalangan jurnalis dan para komentator politik.

Sebagai bangsa yang cerdas dan berwawasan kemajuan, dibalik kontroversi ihwal kemanfaatan indeks FSI, kita harus mencermati penempatan dan pemeringkatan indeks FSI serta menjadikannya sebagai inspirasi untuk menggelorakan semangat dalam melanjutkan prestasi pembangunan. Walaupun demikian, bila kita telaah lebih lanjut, adalah suatu hal yang sangat berlebihan jika langsung menyatakan bahwa Indonesia adalah negara gagal atau menuju pada kegagalan. Justru parameter-parameter yang menjadi indikator negara gagal beserta seluruh faktornya, bila kita jadikan sebagai tolok ukur pembangunan, sesungguhnya malah makin meyakinkan kita, bahwa bangsa Indonesia sangat jauh dari penilaian sebagai negara gagal atau hampir gagal.

Pada parameter sosial untuk faktor tekanan demografis, laju pertumbuhan penduduk di tanah air berlangsung dengan normal dan sangat terkendali. Merujuk data BPS, Laju pertumbuhan penduduk di kurun waktu 1980-1990 yang masih berada di kisaran 2% berangsur-angsur berhasil dikendalikan hingga 1,49% di lima tahun terakhir. Kondisi itu membuktikan bahwa bangsa Indonesia sanggup mengatasi risiko ledakan penduduk.

Bangsa Indonesia juga sanggup mengatasi peningkatan jumlah penduduk berusia produktif dengan menghadirkan lapangan kerja dalam jumlah yang cukup. Menurut rilis BPS, pada bulan Februari 2011, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 119,40 juta orang, atau bertambah 3,40 juta dibanding angkatan kerja Februari 2010 yang sebesar 116,00 juta orang atau bertambah 5,66 juta dibanding Februari 2009 yang sebesar 113,74 juta orang. Peningkatan jumlah angkatan kerja itu dapat langsung diserap di berbagai kegiatan ekonomi yang nampak nyata dari peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di bulan Februari 2011, bila dibandingkan dengan kondisi Februari 2009 dan 2010. Pada Februari 2011, TPAK mencapai 69,96%, sedangkan TPAK Februari 2009 dan 2010 masing-masing sebesar 67,60% dan 67,83%. Dengan kondisi itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2011 juga mengalami penurunan dibandingkan Februari 2009 dan 2010. TPT Februari 2011 mencapai 6,80%, atau menurun signifikan bila dibandingkan TPT Februari 2009 dan 2010 yang masing-masing sebesar 8,14% dan 7,41%.

Pada parameter sosial untuk faktor pergerakan besar-besaran pengungsi yang diakibatkan oleh kekerasan maupun penindasan yang masif dan berkelanjutan, kita mencatat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sudah tidak terjadi lagi peristiwa konflik horisontal berskala besar, apalagi yang menyebabkan arus pengungsian hingga keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa konflik komunal yang cukup masif yang pernah terjadi di masa lalu, antara lain di Maluku, Poso, Sanggau-Ledo, Sampit dan Sambas yang sempat mengakibatkan timbulnya gelombang pengungsian dan penderitaan masyarakat, sudah dapat ditanggulangi dan diantisipasi, sehingga fenomena konflik komunal sejenis tidak terulang kembali.

Pada parameter sosial untuk faktor warisan dendam dan keluhan kelompok tertentu, dapat kita cermati bahwa setelah reformasi 1998 hingga saat ini, pembangunan berdemokrasi telah mengarah kepada demokrasi yang makin berkualitas,

makin transparan dan makin akuntabel. Pemerintah, utamanya di enam tahun terakhir, telah banyak memfasilitasi kegiatan rekonsiliasi yang ditujukan untuk makin meningkatkan kekompakan dan soliditas antar warga bangsa dan berbagai kelompok masyarakat.

Pemerintah, antara lain telah menggagas dan memfasilitasi Forum Pemda Damai sebagai forum konsultasi, koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah dan daerah dalam upaya pencegahan dan pengelolaan konflik sosial/kekerasan. Pemerintah terus mengedepankan pendekatan humanis dengan memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis; distribusi pembangunan ekonomi, pendidikan yang merata; menguatnya toleransi antar anggota/ kelompok masyarakat; perlakuan hukum secara adil; serta penerapan prinsip transparansi, integritas dan akuntabilitas di semua pelaksanaan program pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah juga terus mengupayakan penyiaran media masa yang sehat sehingga masyarakat tidak mudah termakan oleh isu dan distorsi informasi.

Demikian pula pada parameter sosial untuk faktor pelarian warga negara yang kronis dan berkelanjutan, hingga saat ini dapat kita cermati dengan nyata, bahwa sudah tidak ada lagi warga bangsa yang meminta suaka politik ke negara lain.

Pada parameter politik untuk faktor kriminalisasi dan delegitimasi negara, kita mencatat bahwa semua upaya penegakkan hukum yang menjadi wujud kewibawaan pemerintah dan negara tetap terlaksana dengan baik; dan sesuai dengan amanat konstitusi. Pada lingkup penegakkan hukum, pemerintah telah menindaklanjuti seluruh penanganan kasus hukum secara tegas dan tanpa diskriminasi, meskipun tentu saja penanganan kasus-kasus hukum itu memerlukan waktu dalam penyelesaiannya.

Pada lingkup pemberantasan tindak pidana terorisme, kita bersyukur, upaya kita selama dua tahun terakhir telah makin banyak mendapat apresiasi komunitas Internasional. Beberapa aksi dan rencana aksi terorisme berhasil diungkap, diatasi

dan diantisipasi, hingga kekhawatiran keamanan dalam negeri dari aspek ancaman terorisme dapat ditekan. Sampai dengan awal tahun 2011, aparat keamanan telah berhasil menangkap ratusan tersangka terorisme, yang semuanya telah diadili sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kewibawaan dan kredibilitas pemerintah dalam melindungi warganya, antara lain juga diwujudkan dengan terus memberikan perhatian besar pada beragam upaya perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Berbagai kasus ihwal perlakuan tidak layak maupun kasus hukum yang menimpa warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, telah ditanggapi dan disikapi konstruktif oleh instansi pemerintah terkait. Wujud lain dari pertanggungjawaban pemerintah dalam melindungi warganya juga dituangkan pada tindakan nyata pemerintah ketika membebaskan kapal niaga MV Sinar Kudus beserta 20 awaknya yang disandera oleh perompak Somalia.

Pada parameter politik untuk faktor penurunan pelayanan publik, kita mencermati bahwa di kurun waktu enam tahun terakhir, kualitas pelayanan publik justru makin meningkat. Pemerintah telah terus mengedepankan prinsip *de-bottlenecking* di berbagai ranah layanan publik. Bahkan pemerintah di tahun 2011 ini pemerintah telah membuat langkah terobosan dengan menggulirkan program Nomor Induk Kependudukan dan telah menggagas fasilitasi layanan pembuatan KTP elektronik bagi seluruh masyarakat, sebagai wujud dari upaya terpadu dalam pendataan penduduk yang makin berkualitas.

Perbaikan pelayanan publik juga diwujudkan pada kalangan bisnis dan dunia usaha. Sejak dua tahun terakhir, perkembangan dari penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah diperluas di berbagai pelosok tanah air. Perkembangan PSTP itu dipadukan dengan memperluas penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) hingga di Kabupaten dan Kota di seluruh pelosok nusantara.

Berbagai kemajuan di bidang pelayanan publik bagi kalangan dunia usaha itu telah menaikkan peringkat investasi Indonesia di ranah internasional. Survei yang dilakukan

oleh *Bloomberg*, terkait dengan Indeks Momentum Ekonomi 2011, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-7 negara di Asia dengan kondisi investasi terbaik dan dengan stabilitas pertumbuhan ekonomi paling stabil hingga 5 tahun kedepan. Lembaga pemeringkat lainnya, yaitu, *Moody's Investors Service* juga telah memperbaiki rating untuk Indonesia dari Ba2 menjadi Ba1, satu level lagi menuju "*investment grade*". Para analis ekonomi Citibank berani mengestimasi bahwa *Moody's* akan segera memasukkan Indonesia dalam "*investment grade*" di semester kedua tahun 2011. Peningkatan rating ini merupakan wujud nyata dari kualitas perbaikan pelayanan publik yang telah terus ditingkatkan, utamanya bagi kalangan bisnis dan dunia usaha.

Guna memelihara kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, pemerintah telah menempatkan reformasi birokrasi dan tata kelola sebagai prioritas pembangunan untuk memastikan terciptanya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan bagi seluruh warga bangsa. Di balik masih adanya sejumlah tantangan dalam menuntaskan reformasi birokrasi, namun secara umum, program nasional reformasi birokrasi telah memfasilitasi pemantapan penataan struktur birokrasi dan memfasilitasi perbaikan kinerja birokrasi yang secara berangsur-angsur telah dapat menghadirkan layanan yang makin cepat, makin murah dan makin baik bagi seluruh masyarakat. Kedepan nanti reformasi birokrasi terus dilanjutkan untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berasaskan pada transparansi, integritas, akuntabilitas dan profesionalisme aparatur negara.

Wujud lain dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan memberikan perhatian makin besar dan makin serius pada kelanjutan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain, telah makin diperluas dengan melakukan pengambilan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian dari upaya penindakan. Pengambilan aset itu di lakukan baik melalui *mutual legal assistance* dengan negara sahabat, ihwal pelacakan, pembekuan, ekstradisi hingga perampasan aset

maupun beragam proses penindakan lainnya yang menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Pemerintah juga telah meningkatkan kerjasama dengan negara-negara sahabat untuk memperluas perjanjian ekstradisi yang di tujukan untuk makin mempersempit ruang gerak bagi para pelaku tindak pidana korupsi..

Pada parameter politik untuk faktor pelanggaran HAM yang luas, sejak sekitar 13 tahun reformasi berjalan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melanjutkan seluruh penyelesaian kasus-kasus HAM. Sejak reformasi gelombang pertama di tahun 1998, upaya penegakkan HAM telah terus digulirkan di seluruh ranah pembangunan. Di era reformasi gelombang kedua ini, Pemerintah telah dan sedang melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2010-2014, yang antara lain, diwujudkan dengan memfasilitasi pelatihan HAM kepada seluruh aparatur negara di tingkat pusat dan daerah guna memastikan pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten hingga kota. Kemajuan penegakkan HAM yang sangat intensif di Indonesia itu, telah menuai apresiasi PBB yang diwujudkan dengan pengangkatan Indonesia sebagai anggota dewan HAM di PBB.

Pada parameter politik untuk faktor netralitas aparatur, hingga saat ini, segenap aparatur negara telah sanggup memelihara dan menegakkan netralitas dalam beragam afiliasi politik. TNI, yang dimasa lalu, pernah disoroti karena keberpihakannya pada kehidupan sosial-politik, telah lama menanggalkan dwifungsi dan saat ini masing-masing matra TNI berkonsentrasi pada pengembangan kapasitas profesional sesuai dengan perannya masing-masing. Saat ini hingga kedepan nanti, pembangunan TNI sepenuhnya difokuskan pada penguatan kemampuan dan modernisasi alutsista, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pertahanan, serta peningkatan profesionalitas seiring dengan pemajuan kesejahteraan prajurit.

Pada parameter politik untuk faktor kemunculan elit faksional, kita mencermati bahwa dibalik terjadinya polemik antar lembaga tinggi negara maupun antar elit politik, semua

itu masih bersifat sporadis dan kasuistis, serta berada dalam batas-batas koridor hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Secara umum kehidupan berpolitik di Indonesia di kurun waktu lebih dari satu dekade sejak bergulirnya reformasi gelombang pertama tahun 1998, tetap berlangsung dengan stabil dan kondusif dan tidak menyebabkan instabilitas pemerintahan. Kemajuan kehidupan multi partai berhasil dipelihara secara konstruktif seiring dengan perkembangan penerapan sistem presidensiil.

Hal itu mewujudkan, antara lain, sejak satu dekade, Bangsa Indonesia terbukti sanggup melaksanakan dua kali Pemilu Legislatif dan Pilpres secara langsung dengan baik, serta ratusan Pilkada di daerah, yang secara umum juga telah berlangsung dengan aman, teduh dan damai. Bahkan bila dicermati dengan seksama, di kurun waktu satu-dua tahun terakhir, para kontestan yang tidak puas dengan hasil pilkada, telah memilih menyelesaikan masalahnya melalui pendekatan hukum, ketimbang aksi anarkis yang destruktif.

Pada parameter politik untuk faktor intervensi negara atau faktor eksternal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita mencermati bahwa hingga saat ini, tidak ada intervensi sedikitpun dalam pengelolaan politik luar negeri RI, apalagi intervensi negara asing pada penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Republik Indonesia sama sekali tidak memerlukan pasukan perdamaian PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan di sejangkalpun wilayah teritorialnya. Bahkan sebaliknya Indonesia secara berkala mengirimkan kontingen pasukan perdamaian dibawah bendera PBB untuk mendukung pemulihan perdamaian dan keamanan internasional.

Pada lingkup yang lebih luas, di kurun waktu enam tahun terakhir, peran internasional Indonesia justru makin mengemuka dan makin diapresiasi oleh komunitas internasional. Bahkan politik luar negeri yang bebas aktif, yang telah lama kita gulirkan, sejak enam tahun terakhir, kita tingkatkan menjadi "*all directions foreign policy*". Kita bersahabat baik dengan berbagai negara di belahan dunia – dari Argentina di ujung selatan Benua Amerika,

hingga Finlandia di ujung utara benua Eropa; dari Senegal di ujung barat Benua Afrika hingga Fiji di ujung timur Samudera Pasifik.

Kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia yang telah menjadikan Indonesia sebagai negara di kelompok 20 kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan menjadi anggota G-20, juga telah makin memperluas peran Indonesia di ranah global. Indonesia bukan lagi negara yang sebatas memberikan peran, namun telah menjadi negara yang ikut berinisiatif dalam mereformasi arsitektur ekonomi dan keuangan global yang lebih berkeadilan untuk memastikan adanya pertumbuhan ekonomi global yang lebih kuat, lebih berimbang dan lebih berkelanjutan. Inisiatif Indonesia lainnya yang diapresiasi oleh komunitas internasional adalah pada ranah pembangunan yang berkelanjutan khususnya pada pengurangan dampak pemanasan global.

Saat ini sebagai ketua ASEAN, Indonesia mengambil inisiatif untuk mempercepat terwujudnya komunitas ASEAN 2015. Sebagai ketua ASEAN Indonesia menjadi kontributor utama dalam mengupayakan solusi damai atas konflik perbatasan yang melibatkan Thailand dan Kamboja. Meskipun bukan negara yang ikut bersengketa, Indonesia juga memfasilitasi penyelesaian atas konflik di laut Cina Selatan, yang melibatkan beberapa negara anggota ASEAN dan negara di luar ASEAN.

Tahun 2011 ini, Indonesia selaku ketua *East Asia Summit* akan terus mendorong hubungan dan interaksi Negara di kawasan yang didasari atas kesimbangan dinamis --*dynamic equilibrium*--; sebuah kondisi dimana seluruh negara di kawasan dapat tumbuh dan berkembang bersama serta maju bersama untuk mencapai *common security, common stability* dan *common prosperity*.

Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim yang terbesar dalam forum Organisasi Konferensi Islam, Indonesia juga terus menyuarakan dan mengambil inisiatif dalam menggelorakan nilai-nilai universal Islam yang moderat, terbuka, toleran, dan modern. Indonesia secara konstruktif terus berperan dan berinisiatif dalam menjembatani perbedaan aspirasi antara

dunia Islam dan dunia Barat. Berbagai inisiatif, peran dan kontribusi Indonesia itu, telah menjadikan Indonesia diakui sebagai *role model* di kalangan negara-negara Islam. Indonesia diakui sebagai negara yang sanggup memadukan kemajuan pembangunan demokrasi dan perluasan penerapan nilai-nilai universal Islam, secara seiring dengan pemajuan pembangunan ekonomi yang makin pesat dan makin menyejahterakan masyarakatnya.

Pada parameter bidang ekonomi, baik untuk faktor ketidakmerataan perkembangan ekonomi maupun perburukan keadaan ekonomi, keduanya adalah parameter yang paling tidak tepat untuk menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi di Indonesia. Bila dibandingkan dengan kemajuan sektor pembangunan lainnya, kinerja makro ekonomi di Indonesia dikurun waktu satu dekade terakhir, justru menunjukkan performa yang paling mengesankan.

Dari sebuah negara yang perekonomiannya mengalami kontraksi di kisaran hingga minus 13% karena krisis moneter di tahun 1997/1998 lalu, bangsa Indonesia saat ini tampil secara meyakinkan sebagai negara dengan kekuatan ekonomi ke-17 terbesar di dunia. Performa pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya besar, tetapi juga sangat dinamis. Pertumbuhan ekonomi tahunan bila dikalkulasi dari tahun 2001 hingga 2010 berada di kisaran 5% atau naik 3,3% dibandingkan satu dekade sebelumnya. Bahkan di tahun 2010 lalu, perekonomian Indonesia tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat ketiga di antara anggota G-20, setelah Cina dan India.

Ihwal ketidak merataan perkembangan ekonomi juga tidak tepat bila dipakai untuk menggambarkan kondisi perkembangan ekonomi Indonesia. Angka Gini Ratio, yang menunjukkan kesenjangan pembangunan terus membaik dari posisi 0,376% di tahun 2007 menjadi 0,331% di tahun 2010. Pendapatan perkapita terus tumbuh pesat hingga mencapai kisaran US\$ 3,000 di tahun 2010. Pendapatan perkapita itu lebih tinggi dibandingkan US\$ 2,590 di tahun 2009 lalu, dan hampir dua kali lipat pendapatan perkapita tiga tahun lalu sebesar US\$ 1.937.

Demikian pula pertumbuhan kelas menengah di Indonesia juga terus meningkat secara makin signifikan.

Demikian pula dengan faktor perburukan keadaan ekonomi, yang sama sekali tidak relevan bila dibandingkan dengan kondisi kemajuan ekonomi Indonesia yang saat ini diakui sebagai salah satu negara dengan tingkat kondusifitas ekonomi yang paling dinamis di Asia. Indonesia, sanggup menunjukkan kepada dunia, bahwa negeri ini setelah belajar dari pengalaman mengelola krisis moneter tahun 1997-1998, terbukti mampu membangun landasan perekonomian yang tangguh, yang menjadikan Indonesia tetap bertahan di tengah krisis keuangan global di tahun 2008 lalu. Kokohnya landasan pembangunan ekonomi, juga menjadikan kita cepat pulih dari krisis keuangan global itu, sehingga di tahun 2010 pertumbuhan ekonomi segera menggeliat kembali hingga mencapai 6,1% --jauh lebih tinggi dibanding tahun 2009 sebesar 4,5% --, dan bahkan melampaui target APBNP-2010 yaitu 6%.

Hingga saat ini, Indonesia berhasil memadukan antara pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan manajemen fiskal yang sehat, beban utang yang makin berkurang, *credit rating* yang makin membaik, seiring dengan tabungan dan investasi yang terus meningkat. Kemajuan pembangunan ekonomi juga telah makin ditopang oleh efisiensi pasar domestik yang lebih kondusif, berkat rezim perpajakan dan fiskal yang makin kompetitif, yang telah memfasilitasi persaingan yang makin intensif. Persaingan yang makin intensif telah ikut mendukung peningkatan peran bisnis dan dunia usaha dalam ikut memperkuat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, utamanya melalui peningkatan aktifitas klaster-klaster industri serta efisiensi manajemen di kalangan bisnis dan dunia usaha. Kondisi itu juga telah menjadikan makin banyaknya perusahaan-perusahaan nasional yang sanggup bermigrasi pada segmen rantai nilai yang lebih tinggi.

Pada parameter ekonomi, untuk faktor perburukan keadaan ekonomi ihwal kegagalan pemerintah dalam membayar gaji dan pensiun para aparatur negara juga dapat ditepis dengan fakta di lapangan, bahwa pemerintah Indonesia tidak saja sanggup

membayar gaji aparatur negara, namun bahkan sanggup untuk terus menaikkan gaji aparatur negara.

Di kurun waktu enam tahun terakhir, gaji PNS, TNI dan Polri terus ditingkatkan di kisaran 10%. Bahkan tunjangan remunerasi bagi PNS di beberapa instansi pemerintahan tertentu telah mulai digulirkan sejak tiga tahun terakhir dan diproyeksikan bahwa seluruh instansi pemerintahan akan memperoleh tunjangan remunerasi di kurun waktu beberapa tahun mendatang; bagi TNI dan Polri, tunjangan remunerasi telah dibayarkan t.m.t Juli 2010. Kedepan nanti, seiring dengan kesanggupan anggaran negara, pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparatur negara sebagai bagian terpadu dari pembinaan profesionalisme aparatur, guna mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbagai performa kemajuan pertumbuhan ekonomi yang pesat itu, menjadikan Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksikan bahwa untuk periode 2011 – 2016 peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai kisaran 6% atau bahkan lebih tinggi, mendekati tingkat pertumbuhan ekonomi Cina sebesar 7,9% dan India 6,7%.

World Economic Forum pada perhelatan yang mengulas tentang Pertumbuhan Ekonomi Asia Timur di bulan Juni 2011 lalu juga berani memproyeksikan bahwa Indonesia dapat berkembang hingga memasuki kelompok sepuluh negara dengan PDB terbesar di dunia pada tahun 2030 mendatang. Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat bergabung dengan kelompok BRIC hingga menjadi BRIIC atau kelompok terdiri yang dari Brasil, Rusia, India, Indonesia, Cina.

World Economic Forum berani memberikan proyeksi itu berlandaskan pada peningkatan daya saing Indonesia yang meningkat signifikan dari ranking ke-54 di tahun 2009 menjadi ke-44 di tahun 2010. Banyak yang tidak memahami, bahwa bila merujuk pada ekspansi peningkatan jumlah negara yang diukur yaitu dari 114 negara menjadi 139 negara, kenaikan daya saing Indonesia itu sesungguhnya adalah prestasi pembangunan yang

luar biasa. Bila di tahun 2005, ada sekitar 53% negara yang diukur peringkat daya saingnya berada di bawah Indonesia, maka di tahun 2010 lalu, lebih dari dua pertiga atau 68%, negara yang diukur peringkat daya saingnya, berada di bawah Indonesia.

Bagi pemerintah Indonesia, kinerja pembangunan ekonomi yang sangat mengesankan itu, telah menjadi alasan utama untuk mempercepat dan memperluas pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sejak tanggal 27 Mei 2011, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 atau lazim dikenal dengan MP3EI. Melalui MP3EI pola pembangunan kita ubah dari *efficient driven economy* di saat ini, hingga menjadi *innovation driven economy* di beberapa tahun mendatang.

Dengan *innovation driven economy*, pendapatan per kapita Indonesia ditargetkan hingga berkisar antara US\$ 14,250– US\$ 15,500 dengan nilai total perekonomian atau PDB berkisar antara US\$ 4,0 hingga 4,5 triliun. Pendapatan perkapita dan PDB sebesar itu, diproyeksikan untuk dapat dicapai melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi di kisaran 8-9% di kurun waktu dua hingga tiga dasawarsa kedepan. Bila seluruh target MP3EI dapat dicapai, *Insyallah*, tidak ada lagi, istilah 'negara gagal' bagi Republik Indonesia, yang ada adalah, Republik Indonesia sebagai negara maju, mandiri dan berdaya saing yang menyejahterakan rakyatnya, serta tampil penuh percaya diri sebagai kekuatan ekonomi terkemuka di dunia.

PENUTUP

Sebagai warga bangsa yang cerdas dan berwawasan kemajuan, diskursus atau wacana negara gagal, harus dapat disikapi secara rasional dan proporsional. Di satu sisi, kemajuan pesat di berbagai ranah pembangunan yang berhasil kita raih selama ini, harus menyadarkan kita bahwasanya wacana negara gagal dalam konteks Indonesia, sesungguhnya adalah sebuah penilaian yang tidak tepat dan ungkapan pesimisme yang terlalu berlebihan.

Bagaimanapun kita harus optimis, bahwa pembangunan yang kita laksanakan di kurun waktu 66 tahun ini telah berada pada jalur yang benar. Bila kita cermati, ketika Republik Indonesia diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, negara ini berada dalam kondisi porak poranda karena revolusi fisik dan hempasan prahara Perang Dunia Kedua. Dalam kurun waktu 66 tahun, kita berhasil membuktikan kepada dunia, bahwa Republik Indonesia tetap kokoh dan tegak berdiri, bahkan menjadi Kekuatan Ekonomi ke-17 terbesar di dunia yang menjadi anggota G-20. Kekuatan ekonomi Indonesia sanggup mengalahkan Negeri Belanda yang pernah menjajah tanah air kita, yang hingga tahun 2011 ini, tidak masuk dalam kelompok 20 kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Di balik optimisme, kita tetap harus bersikap rasional. Kita patut mewaspadai bahwa negara gagal adalah sebuah kondisi yang bersifat dinamis. Kita mencatat, negara seperti Norwegia yang dikategorikan sebagai negara di peringkat kedua terbaik di dunia setelah Finlandia dalam hal stabilitas penyelenggaraan negara, baru-baru ini pun diguncang oleh aksi terorisme yang dilakukan oleh warganya sendiri dan telah merenggut puluhan korban jiwa. Fenomena yang dialami Norwegia harus menjadi pembelajaran berharga bagi kita bahwa upaya pemeliharaan stabilitas pembangunan akan terus berhadapan dengan tantangan yang kompleks dan tidak ringan.

Dalam kaitan itu, khususnya di tengah era kebebasan dan keterbukaan ruang publik yang makin semarak dewasa ini, menjadi kewajiban bagi kita sebagai warga bangsa untuk dapat

terus memanfaatkan keterbukaan publik, sebagai akses guna membangun dan memperluas ruang komunikasi dan dialog yang produktif, yang dapat memfasilitasi transaksi pengetahuan yang bermanfaat dan saling melengkapi diantara sesama warga bangsa, utamanya guna dikonstruisikan dalam mengatasi kompleksitas tantangan peradaban.

Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kedepankan sikap optimis dan energi positif dalam menyikapi tantangan masa depan. Mari kita tepis argumen dan pendapat yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang diambang kegagalan, apalagi sebuah negara gagal. Sebaliknya, mari kita budayakan pemanfaatan ruang keterbukaan publik secara makin cerdas dan makin mencerahkan, dengan menyeimbangkan antara nilai-nilai keterbukaan; dengan nilai-nilai keadaban, harmoni, toleransi, keadilan dan ketertiban.

BAHAN RUJUKAN

- James Dobbins, *"Who lost Iraq? Lessons from the Debacle,"* Foreign Affairs 86, no. 5 September/October 2007,
- James Wright, *"Canadian Policy Towards Fragile, Dangerous, and Failed States,"* Conference on Fragile States, Dangerous States and Failed States, University of Victoria, 25-27 November 2005, di unduh dari situs web beralamat http://www.failedstates.org/documents/keynote_asdelivered.pdf,
- Jared Diamond, *"Collapse: How Societies Choose to Fail or to Succeed"*, New York: Viking, 2005,
- Majalah *Foreign Policy*, edisi Juli-Agustus 2007, diunduh dari situs web beralamat : http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3865,
- Lenard J. Cohen, *"The Responsibility to Perfect: International Learning to rebuild shattered States,"* Conference on Fragile States, Dangerous States and Failed States, diunduh dari situs web beralamat di: <http://www.failedstates.org/documents/LenardCohen.pdf>,